



PEMERINTAH KABUPATEN
PANDEGLANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PANDEGLANG

2025 – 2029



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PANDEGLANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan	1-8
1.3.1 Maksud.....	1-8
1.3.2 Tujuan	1-8
1.4 Sistematika Penulisan	1-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PANDEGLANG.....	2-1
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.....	2-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	2-1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.....	2-8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.....	2-10
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	2-12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	2-13
2.2.1 Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.....	2-13
2.2.2 Isu Strategis.....	2-14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PANDEGLANG ..	3-1

3.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	3-1
3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	3-1
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	3-3
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	4-1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	4-1
4.1.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra DPUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029	4-1
4.2 Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	4-16
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029	4-16
BAB V PENUTUP	5-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran	1-3
Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pandeglang	2-8

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Tahun 2025.....	2-9
Tabel 2. 2 Tingkat Pendidikan ASN Tahun 2025	2-9
Tabel 2. 3 Golongan/Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025.....	2-9
Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pandeglang Kewenangan DPUPR Kabupaten Pandeglang	2-11
Tabel 2. 5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pandeglang Kewenangan PUPR Kabupaten Pandeglang	2-11
Tabel 2. 6 Nilai AKIP DPUPR Tahun 2021-2024	2-12
Tabel 2. 7 Isu Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	2-16
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	3-2
Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang	3-3
Tabel 3. 3 Tahapan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Pandeglang.....	3-5
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja DPUPR Tahun 2025-2029	4-2
Tabel 4. 2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	4-16
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029	4-17
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKK) DPUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029	4-18

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, kesempatan, berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis adalah rencana kerja selama 5 (Lima) Tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029. Setiap organisasi baik formal maupun non formal disadari maupun tidak, sudah selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang berperan sebagai dasar tuntunan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen Renstra ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi dokumen Renstra ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan Dokumen Renstra ini. Semoga Dokumen Renstra ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang di masa mendatang.

Pandeglang, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pandeglang



ASEP RAHMAT, ST

NIP. 19690425 199803 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Renstra merupakan faktor penting agar proses pembangunan yang membawa perubahan dapat terselenggara secara dinamik dan terstruktur. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (SP3D) Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 - 2029 (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 - 2029) sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang (yang selanjutnya disebut dengan Renstra DPUPR Kabupaten Pandeglang).

Renstra DPUPR Kabupaten Pandeglang disusun bertujuan untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPUPR Kabupaten Pandeglang (sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang) dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pandeglang tersebut agar selaras dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of*

ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (SP3D) Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten. Oleh karena itu disusunlah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode tersisa yaitu 5 (lima) Tahunan dan pokok-pokok isi dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang. Dan hal ini menunjukkan tentang perlunya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang yang menggambarkan target capaian Kinerja Pembangunan Daerah sehingga mudah untuk ditrasformasikan kedalam Rencana Kerja Tahunan.

Adapun alur Perencanaan dan Penganggaran serta keterkaitan antara Renstra K/L, RPJM Nasional, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD dapat dilihat dalam bagan berikut ini :



Gambar 1. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Renstra DPUPR Kabupaten Pandeglang ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing bidang di lingkungan DPUPR Kabupaten Pandeglang serta Rencana Kerja dan Anggaran DPUPR Kabupaten Pandeglang tahun 2025 - 2029.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
12. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (SP3D) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang disusun dengan maksud memberikan arah yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu periode 2025 - 2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang antara lain :

- a. Sebagai pedoman teknis dalam penyusunan Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berorientasi terhadap pendekatan ekonomi, efektif dan efisien serta akuntabilitas publik.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.
- c. Sebagai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang sebagai Dinas teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang pada dasarnya memberikan arah yang komprehensif dan berkesinambungan dalam mendeskripsikan rencana yang akan dicapai dengan segala peluang dan tantangan yang dimiliki. Sistematika penulisan akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan,

menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.

- BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang,
menjelaskan tentang Tupoksi, Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang,
menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang,
menjelaskan tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Tupoksi, dalam mencapai Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- BAB V Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PANDEGLANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang adalah salah satu organisasi pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan wajib terkait pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang menyelenggarakan fungsi dan kewenangan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebinamargaan, pengairan, bina kontruksi, cipta karya, tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP).
 - a) Jabatan Fungsional Perencana
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 - 1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan

- 2) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - b) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan
 - 3) Bidang Bina Kontruksi, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
 - 4) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
 - b) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan
 - 5) Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Penata Ruang
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebinamargaan, pengairan, bina konstruksi, cipta karya, tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengeoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
 - b. Pengeoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup dinas;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahi:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP).

a. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum kepegawaian dan pengelolaan administrasi umum kepegawaian serta merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan dinas.
- c. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
 - 2. Perencanaan kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada dinas;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
 - 4. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada dinas;
 - 5. Pembagian pelaksanaan tugas pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup dinas; dan
 - 6. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada dinas; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pada dinas .
3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan pada dinas;
 - b. Penghimpunan perencanaan program dan kegiatan pada dinas;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan pada dinas;
 - d. Evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1) Jabatan Fungsional Perencana

Pejabat Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan memproses penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pada dinas.

3. Bidang Binamarga

- a. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 1. Perencanaan operasional kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan;

2. Pengelolaan kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3.1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan

Pejabat fungsional teknik jalan dan jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
2. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
3. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan, pengelolaan leger jalan, survey kondisi jalan/jembatan.

4. Bidang Sumber Daya Air

- a. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sumber daya air.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan operasional kegiatan sumber daya air;
 2. Pengelolaan kegiatan sumber daya air;
 3. Pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan kegiatan sumber daya air;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4.1) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan

Pejabat fungsional teknik pengairan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan (OP);
2. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Sumber Daya Air; Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Sumber Daya Air.

5. Bidang Bina Konstruksi

- a. Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan jasa konstruksi.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
 1. perencanaan operasional kegiatan jasa konstruksi;
 2. pengelolaan kegiatan jasa konstruksi;
 3. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan jasa konstruksi; dan
 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

5.1) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Pejabat fungsional Pembina jasa konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang bina konstruksi, mempunyai tugas pokok :

1. Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi;
2. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
3. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, dan membagi tugas Pengawasan kegiatan Jasa Konstruksi.

6. Bidang Cipta Karya

- a. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan cipta karya.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan operasional kegiatan cipta karya;
 2. Pengelolaan kegiatan cipta karya;
 3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan cipta karya; dan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

6.1) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

Pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang cipta karya, mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya
2. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

6.2) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan

Pejabat fungsional teknik penyehatan lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang cipta karya, mempunyai tugas pokok :

1. Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).

7. Bidang Penataan Ruang

- a. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas merumuskan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan pengendalian ruang.

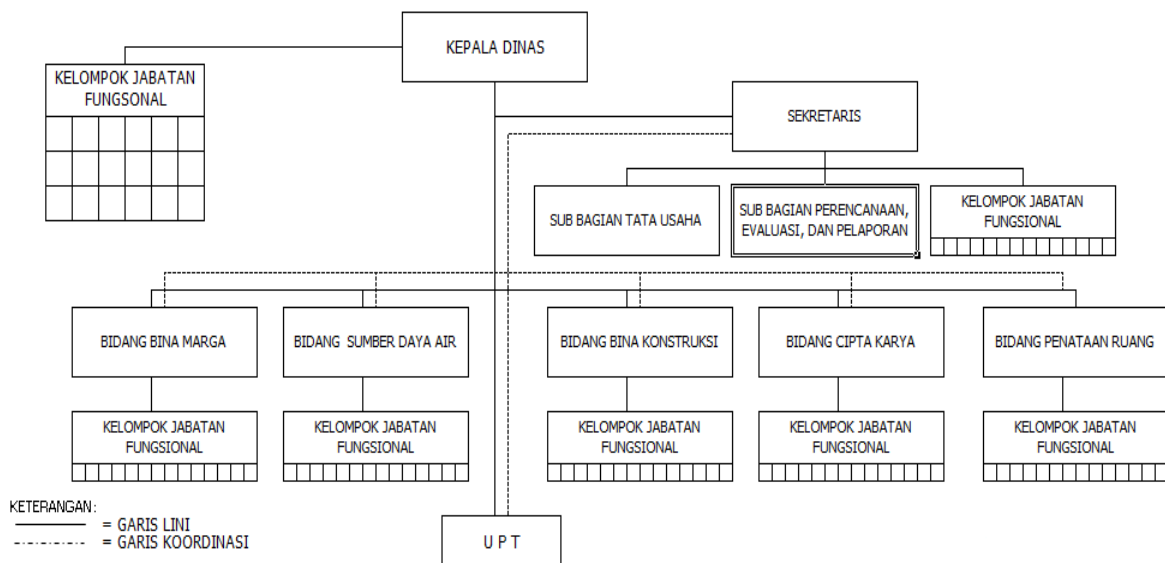
c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7.1) Jabatan Fungsional Penata Ruang

Pejabat fungsional penata ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan ruang, mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang.
2. Melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan ruang.
3. Melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang.



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pandeglang

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang pada tahun 2025 (berdasarkan data dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian

pada bulan Juni 2025) berjumlah 215 Orang. Untuk mengetahui gambaran umum kompetensi pegawai Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan/kepangkatan, latar belakang disiplin ilmu, pendidikan dan pelatihan serta diklat penjenjangan (struktural), adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Tahun 2025

Jenis Pegawai	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	90 Orang
PPPK	04 Orang
Tenaga Kontrak Kerja	14 Orang
Tenaga Kontrak Sukarela	107 Orang
Jumlah	215 Orang

Tabel 2. 2 Tingkat Pendidikan ASN Tahun 2025

Tingkat Pendidikan ASN	Jumlah
S2	07 Orang
S1	44 Orang
DIV	01 Orang
DIII	04 Orang
SLTA	37 Orang
SLTP	01 Orang
SD	01 Orang
Jumlah	94 Orang

Tabel 2. 3 Golongan/Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025

Golongan	Pangkat	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV/c	01 Orang
Pembina	IV/a	03 Orang
Penata Tk. I	III/d	11 Orang
Penata	III/c	13 Orang
Penata Muda Tk. I	III/b	18 Orang
Penata Muda	III/a	26 Orang

Golongan	Pangkat	Jumlah
Pengatur Tk. I	II/d	11 Orang
Pengatur	II/c	05 Orang
Pengatur Muda Tk. I	II/b	02 Orang
Pengatur Muda	II/a	00 Orang
Juru Tingkat I	I/d	00 Orang
Jumlah		90 Orang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang.

Kinerja pelayanan DPUPR Pandeglang merupakan gambaran atas seberapa baik DPUPR menjalankan fungsi utamanya sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang. Pembahasan kinerja pelayanan menjadi penting karena menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi DPUPR ke depan. Evaluasi kinerja layanan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan peran DPUPR selama lima tahun terakhir.

Capaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kabupaten Pandeglang 2021-2024 terdiri dari Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menjadi kewenangan DPUPR dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum. Capaian IKU dan SPM DPUPR Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pandeglang Kewenangan DPUPR Kabupaten Pandeglang

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG		2021		2022		2023		2024	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Kondisi Jalan Kabupaten mantap (%)	61,23	63,89	66,73	68,51	69,58	70,57	72	70,67
2	Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan permukiman	Cakupan layanan air bersih (%)	72,17	72,17	72,38	73,12	72,68	73,86	73,97	74,44
		Cakupan layanan sistem air limbah domestik (%)	68,49	70,52	68,74	70,90	69,00	70,89	69,25	71,20
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten	Tingkat kepatuhan terhadap RTRW (%)	64,47	64,5	64,77	64,8	65,07	65,12	65,37	65,5

Tabel 2. 5 Capaian Standar Pelayan Minimal (SPM) Kabupaten Pandeglang Kewenangan PUPR Kabupaten Pandeglang

No.	INDIKATOR SPM PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG	2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Kebutuhan Air Minum Sehari hari	100	72,17	100	73,12	100	73,86	100	74,44
2	Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	100	70,52	100	70,90	100	70,89	100	71,20

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPUPR Kabupaten Pandeglang merupakan instrumen utama untuk memastikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja internal berjalan terintegrasi, transparan, dan berorientasi hasil. Capaian AKIP berpengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola pembangunan serta hasil penilaian SAKIP Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan. Data perkembangan AKIP DPUPR Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Nilai AKIP DPUPR Tahun 2021-2024

Komponen yang dinilai		Nilai				Ket.
		2021	2022	2023	2024	
a.	Perencanaan Kinerja	20,70	20,70	24,60	24,60	tetap
b.	Pengukuran Kinerja	17,40	18,00	19,80	21,60	+ 1,8
c.	Pelaporan Kinerja	09,75	09,75	08,25	08,85	+ 0,6
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	13,00	13,00	15,20	15,25	+0,05
Nilai Hasil Evaluasi		60,85	61,45	67,90	70,30	+ 2,4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	BB	

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Kelompok saasran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya antara lain:

1. Jalan dan Jembatan kewenanga Kabupoaten Pandeglang;
2. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Pandeglang;
3. Wilayah Ruang Kabupaten Pandeglang;
4. Warga masyarakat Pandeglang yang belum memiliki sarana air bersih dan sanitas;
5. Warga masayrakat yang akan mengajukan perizinan bangunan gedung;
6. Pekerja konstruksi di wilayah Kabupaten Pandeglang;
7. Penyedia jasa konstruksi;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

2.2.1 Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu dinas teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan dokumen RPJMD adalah Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Tingginya Angka Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.

Keterbatasan infrastruktur dasar di Kabupaten Pandeglang, seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan telekomunikasi, serta prasarana layanan publik, masih menjadi hambatan serius, khususnya di wilayah desa dan terpencil. Banyak ruas jalan rusak dan belum terkoneksi secara memadai, terutama saat musim hujan, yang menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta konektivitas antar wilayah.

Kemiskinan ekstrem dan stunting masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Pandeglang. Sebagian penduduk hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan bergizi, hunian layak, pendidikan, serta layanan kesehatan. Kondisi ini banyak ditemukan di wilayah pedesaan terpencil yang mengalami keterbatasan infrastruktur, layanan sosial, dan akses ekonomi. Ketergantungan pada sektor informal dan ketidakstabilan pendapatan memperburuk kerentanan masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan iklim.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh DPUPR Kabupaten Pandeglang adalah:

1. Minimnya anggaran yang disediakan (dianggarkan) oleh Pemerintah Daerah untuk Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur baik Infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya;
2. Belum adanya Sistem Informasi/Database baik untuk jaringan irigasi maupun jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga menghambat prioritas pembangunan yang dilakukan;
3. Masih banyak Infrastruktur baik itu Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya yang kondisinya perlu dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas bahkan tidak sedikit penentuan lokasi diintervensi oleh pihak-pihak diluar dinas teknis dan disisi lainnya Hasil Musrenbang Kecamatan Prioritas Penanganan (khususnya bidang infrastruktur) masih belum maksimal dan terarah. Hal ini disebabkan masih banyaknya usulan Hasil Musrenbang Kecamatan

- Prioritas untuk Penanganan tahun berikutnya tidak fokus pada penuntasan kebutuhan prioritas masyarakat di lapangan, sehingga seharusnya dengan adanya pagu indikatif hasil musrenbang untuk tiap-tiap kecamatan dapat diarahkan pada penuntasan kebutuhan prioritas peningkatan infrastruktur di tiap-tiap kecamatan dengan harapan ada sinergitas antara perencanaan teknoratis dengan usulan prioritas hasil musrenbang kecamatan;
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistim irigasi, sebagai salah satu infrastruktur penunjang sektor pertanian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur jalan pun sudah sangat menurun, terutama terkait pemeliharaan bahu jalan dan saluran pembuangan air (Drainase dan selokan-selokan pinggir jalan);
 5. Jaringan Irigasi belum terkelola dengan baik dan terlalu banyaknya Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten serta masih banyaknya kondisi Jaringan Irigasi yang harus dipelihara dan segera diperbaiki, sementara anggaran yang tersedia dari APBD sangat terbatas;
 6. Kurangnya Pembinaan terhadap Petani Pemakai Air (P3A) dan P3A belum mempunyai rasa memiliki terhadap Jaringan Irigasi yang ada, sementara anggaran untuk pembinaan terhadap P3A yang disediakan dari APBD sangat terbatas;
 7. Kurangnya tenaga teknis untuk selalu memantau kondisi jalan, dan kurangnya kepedulian masyarakat pengguna jalan itu sendiri.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam merumuskan kebijakan – kebijakan yang dilakukan guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dirasakan perlu untuk menentukan isu-isu strategis apasaja yang sedang berkembang saat ini. Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 – 2029 isu strategis yang ditetapkan adalah:

1. Risiko bencana alam yang tinggi;
2. Masih rendahnya infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian unggulan;
3. Belum optimalnya daya saing daerah dan investasi;
4. Masih rendahnya kemandirian fiskal;
5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat;
6. Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem dan stunting;
7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan;

8. Masih rendahnya derajat kesehatan dan tingginya stunting;
9. Ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada sektor informal;
10. Kualitas pendidikan yang belum merata dan rendahnya daya saing SDM;
11. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan;
12. Masih lemahnya sistem perlindungan sosial dan ketahanan sosial;
13. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari daftar isu strategis yang dalam RPJMD, yang terkait dan menjadi kewenangan DPUPR Kabupaten Pandeglang adalah:

1. Masih Rendahnya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian Unggulan

Keterbatasan infrastruktur yang menghambat konektivitas antara daerah pusat pertumbuhan dan wilayah terpencil, serta rendahnya kualitas jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya, menjadi isu strategis yang mendesak untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan potensi perekonomian unggulan di daerah ini.

2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Isu strategis ini berkaitan dengan perlunya intervensi yang lebih terarah dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, serta penanggulangan stunting melalui program gizi dan kesehatan yang lebih baik, serta peningkatan ekonomi keluarga. Penanganan masalah ini memerlukan kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk mencapai hasil yang optimal.

Adapun isu-isu strategis menurut KLHS RPJMD yang menjadi perhatian utama, antara lain:

1. Masih tingginya risiko bencana alam;
2. Kualitas lingkungan hidup yang menurun;
3. Ketimpangan akses layanan dasar dan infrastruktur;
4. Tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan terhadap sektor informal;
5. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi;
6. Kebutuhan transisi menuju ekonomi rendah karbon;
7. Penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan;
8. Pertumbuhan investasi daerah dan penciptaan iklim usaha daerah.

Tabel 2. 7 Isu Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sumber Daya Air	Masih terdapat saluran irigasi dengan kondisi rusak	Ketimpangan Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur	Intensitas banjir meningkat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur waduk, situ, dan jaringan irigasi, serta mengganggu ketahanan pangan dan energi (OECD 2024).	Tantangan dalam pengelolaan wilayah sungai dan cekungan air tanah strategis nasional yang melintasi Provinsi dan Negara menjadi tantangan yang mencakup konservasi air dan pengendalian daya rusak air yang berdampak pada ekonomi regional.	- Rendahnya kualitas air akibat pencemaran - Ketersediaan air baku di Provinsi Banten saat ini selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya	1. Masih Rendahnya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian Unggulan
Bina Marga	- Lebar jalan rata-rata yang masih dibawah standar. - Kerusakan jalan akibat umur teknis yang sudah habis	Ketimpangan Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur.	- Infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai negara mengalami kerusakan parah akibat banjir, badai, dan suhu	Tantangan dalam pengembangan jaringan jalan tol, jembatan antarpulau, dan jalur kereta api untuk mendukung	Proporsi jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten yang memenuhi kualifikasi kondisi mantap belum	1. Masih Rendahnya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Pendidikan, Kesehatan, dan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	dan adanya muatan lebih kendaraan.		ekstrem (OECD 2024). - Masih terdapat ketimpangan akses jalan yang memadai antara perkotaan dan pedesaan di banyak negara berkembang (UN SDGs Progress Report 2024).	konektivitas wilayah dan pengembangan ekonomi nasional.	mencapai 100 persen.	Perekonomian Unggulan
Penataan Ruang	- Belum optimalnya pengendalian perubahan pola ruang dan struktur ruang - Belum optimalnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang	Pertumbuhan investasi daerah dan penciptaan iklim usaha daerah	- Pertumbuhan kota yang cepat tanpa perencanaan ruang memicu kepadatan penduduk, kemacetan, kekurangan ruang hijau, serta meningkatnya kawasan kumuh	- Alih fungsi lahan yang tidak terkendali - Ketidakesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW - Tingginya risiko bencana	- Masalah struktur ruang, keterkaitan antar wilayah Kabupaten/Kota - Konflik kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang terutama di wilayah pesisir.	1. Masih Rendahnya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian Unggulan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penerapan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang. - Belum ada instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang mudah diterapkan dan memberikan dampak terjadinya tertib tata ruang. - Kebijakan dan dasar hukum penataan ruang yang sering berubah-ubah. 		<ul style="list-style-type: none"> (UN Habitat 2024). - Konversi lahan pertanian, hutan, dan daerah resapan menjadi permukiman dan industri mengancam ketahanan pangan serta memperbesar risiko bencana (FAO 2025). - Penataan ruang yang tidak berbasis mitigasi bencana membuat kawasan rawan banjir, longsor, dan gempa tetap dihuni atau dimanfaatkan 	<ul style="list-style-type: none"> wilayah terbangun - Ketimpangan pembangunan antarwilayah - Rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang terpadunya penataan ruang dan layanan infrastruktur dasar. - Banyaknya terjadi alih fungsi. 	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			<p>secara intensif (UNDRR 2024).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas antarwilayah belum merata, sehingga menimbulkan disparitas pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan (OECD 2025). - Masih lemahnya penegakan aturan pemanfaatan ruang, sehingga banyak terjadi pelanggaran tata ruang dan konflik penggunaan lahan (World Bank 2024). 			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Jasa Konstruksi	<p>- Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) kewenangan provinsi.</p> <p>- Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi, permasalahannya website SIPJAKI yang saat ini belum optimal karena sering down. Namun, jasa konstruksi secara berkala meng-update data dan informasi jasa konstruksi yang didalamnya termasuk data tenaga ahli, badan</p>	<p>Ketimpangan Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur</p>	<p>- Tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi menuntut peningkatan standar keselamatan serta penerapan sistem manajemen K3 yang lebih ketat (International Labour Organization/ILO, 2024).</p> <p>- Keterbatasan tenaga kerja terampil dan bersertifikat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas proyek konstruksi (Asian</p>	<p>- Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK)</p> <p>- Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>- Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi</p> <p>- Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal</p>	<p>Masih kurangnya produktivitas tenaga kerja sebesar 4,36%</p>	<p>1.Masih Rendahnya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian Unggulan</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	usaha, pasar konstruksi, dsb.		Development Bank/ADB, 2025).			
Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. - Masih ada yang belum memiliki akses terhadap air minum layak. - Sarana dan Prasarana Pengelollan sampah belum memadai. 	Ketimpangan Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur	<p>Sekitar 2,2 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses terhadap air minum yang amankhususnya di Negara Berkembang (WHO dan UNICEF, 2025)</p> <p>- 3,4 miliar orang belum memiliki akses sanitasi yang aman dan higienis (UN SDG, 2025)</p> <p>- Pencemaran dari limbah domestik, pertanian, dan</p>	<p>Kebutuhan infrastruktur perkotaan, seperti jaringan air bersih, listrik, dan pengelolaan limbah menjadi tantangan besar untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur ini harus terintegrasi dengan baik, terutama di kawasan metropolitan.</p>		<p>1. Masih Rendahnya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian Unggulan</p> <p>2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			industri meningkatkan tekanan pada kualitas air. (UN Water, 2025)			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PANDEGLANG

3.1 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Sebagai penjabaran atas Visi Kabupaten Pandeglang, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang dalam periode lima tahun ke depan adalah "Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas".

Pencapaian tujuan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan wilayah, menurunkan kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan daya saing daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Adapun sasaran berdasarkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang yang akan dicapai antara lain:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Air Minum
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur Sanitasi
3. Meningkatkan kualitas Penataan Ruang
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah
5. Meningkatkan Kompetensi SDM Jasa Konstruksi
6. Meningkatkan Irigasi dalam Kondisi Baik
7. Meningkatkan kualitas Infrastruktur Persampahan
8. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Lebih detail mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
- Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Persentase Layanan Infrastruktur (%)	-	60	61,25	62,50	63,75	65,00	66,25	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	-	15,8	16,65	17,5	18,35	19,2	20,05	
			Kapasitas Air Baku ((%))	2,006	2,009	2,012	2,015	2,018	2,021	2,024	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Sanitasi	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	71,20	71,30	71,40	71,51	71,61	71,71	71,82	
		Meningkatnya kualitas Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Ruang terhadap RTRW (%)	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) (%)	65,6	67,6	69,6	71,6	73,6	75,6	77,6	
		Meningkatnya Kompetensi SDM Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengikuti Assesment (%)	80	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Irigasi dalam Kondisi Baik	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	45,94	46,97	48,00	49,22	50,34	51,47	52,59	
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Persampahan	Persentase Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah Kabupaten yang tersedia (%)	-	0	0	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,30	70,55	70,80	71,05	71,30	71,55	71,80	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (%)	63,62	100	100	100	100	100	100			

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang, mengacu pada RPJMD Kabupaten Pandeglang adalah:

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Ket.
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum	Meningkatkan cakupan layanan air bersih	Meningkatkan sarana prasarana air bersih pada lokasi-lokasi rawan air bersih	
	2. Meningkatnya kualitas infrastruktur sanitasi	Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas sanitasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik bidang sanitasi lingkungan	
	3. Meningkatnya kualitas Penataan Ruang	Meningkatkan sinkronisasi penataan ruang	Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pembinaan penataan ruang	
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur konektivitas wilayah	Meningkatkan kinerja jaringan jalan dan jembatan kabupaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas capaian pembangunan jalan dan jembatan dalam kewenangan kabupaten	
	5. Meningkatnya kompetensi SDM jasa konstruksi	Meningkatkan kualitas SDM pelaku jasa konstruksi	Melakukan pelatihan SDM pelaku jasa konstruksi	

	6. Meningkatnya Irigasi dalam Kondisi Baik	Meningkatkan sarana prasarana penunjang irigasi	Melaksanakan pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten	
	7. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Persampahan	Meningkatkan sarana persampahan	Membangun sarana persampahan	
	8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Memberikan pelayanan penunjang urusan pemerintah dengan baik	
	9. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Mendorong masyarakat mengurus perizinan	Memper memudahkan layanan perizinan	

Tabel 3. 3 Tahapan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Pandeglang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Fondasi: Pemerataan Layanan Dasar dan Infrastruktur Prioritas Pertumbuhan Ekonomi	Pandeglang Mantap: Penguatan Integrasi Infrastruktur Prioritas dan Potensi Unggulan berbasis Ekonomi Lokal, Peningkatan Kualitas SDM, serta Tata Kelola Profesional	Pandeglang Berbudaya dan Berkarakter: Akselerasi Akses Infrastruktur Strategis, Pembangunan SDM yang Berdaya Saing, Transformasi Ekonomi Berkelanjutan, dan Tata Kelola yang Adaptif	Pandeglang Sejahtera: Pembangunan Wilayah Merata dan Berkelanjutan yang Ditopang SDM Unggul dan Tata Kelola Profesional dan Adaptif	Modalitas Pembangunan: Perwujudan Pandeglang Maju melalui Infrastruktur mantap, Pertumbuhan ekonomi dan Keluarga sejahtera

Sumber: Bappeda Kabupaten Pandeglang, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

4.1.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra DPUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2025–2029

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra ini disusun berdasarkan sasaran dan strategi yang telah dirumuskan di bab sebelumnya.

Setiap subkegiatan dipilih secara tepat dan disusun dengan mempertimbangkan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Semua program dan kegiatan yang dirancang dijabarkan dalam bentuk tabel yang memuat sasaran, indikator kinerja, target, serta estimasi anggaran. Renstra 2025-2029 mencakup 10 (sepuluh) Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, 18 (delapan belas) Kegiatan, 82 (delapan puluh dua) Subkegiatan dengan 82 (delapan puluh dua) Indikator kinerja. Detil program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh DPUPR 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja DPUPR Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				47.648.201.200,00		56.772.938.400,00		68.064.007.900,00		72.234.645.900,00		77.890.383.300,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.562.154.000,00		10.143.879.000,00		10.326.702.000,00		10.513.958.000,00		11.386.216.000,00		
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Perangkat Daerah (Nilai)	82,33	82,9	9.562.154.000,00	83,2	10.143.879.000,00	83,5	10.326.702.000,00	83,8	10.513.958.000,00	84,1	11.386.216.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang berkelanjutan (Nilai)	-	-		1		1		1		1			
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000,00		14.000.000,00		21.000.000,00		28.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	7.000.000,00	0	14.000.000,00	0	21.000.000,00	0	28.000.000,00	0	35.000.000,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	16		16		16		16		16			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	7		7		7		7		7			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	2	1.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	4.000.000,00	3	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	4	1.000.000,00	4	2.000.000,00	4	3.000.000,00	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	16	1.000.000,00	16	2.000.000,00	16	3.000.000,00	16	4.000.000,00	16	5.000.000,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	7	1.000.000,00	7	2.000.000,00	7	3.000.000,00	7	4.000.000,00	7	5.000.000,00		
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.438.953.347,00		8.977.362.669,00		9.097.163.669,00		9.240.583.239,00		10.067.634.953,00		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	8.438.953.347,00	12	8.977.362.669,00	12	9.097.163.669,00	12	9.240.583.239,00	12	10.067.634.953,00		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.438.953.347,00		8.977.362.669,00		9.097.163.669,00		9.240.583.239,00		10.067.634.953,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	8.438.953.347,00	12	8.977.362.669,00	12	9.097.163.669,00	12	9.240.583.239,00	12	10.067.634.953,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.000.000,00		112.000.000,00		135.000.000,00		152.000.000,00		169.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	100.000.000,00	2	112.000.000,00	2	135.000.000,00	2	152.000.000,00	2	169.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		12.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	20.000.000,00	2	12.000.000,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	15.000.000,00	2	17.000.000,00	2	20.000.000,00	2	23.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	23.000.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	20.000.000,00	2	23.000.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00	2	30.000.000,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				967.700.653,00		982.516.331,00		1.000.538.331,00		1.014.374.761,00		1.026.581.047,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			967.700.653,00		982.516.331,00		1.000.538.331,00		1.014.374.761,00		1.026.581.047,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		0		0			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0		0		0		0		0			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				215.000.000,00		220.000.000,00		235.000.000,00		247.000.000,00		250.000.000,00			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	215.000.000,00	1	220.000.000,00	1	235.000.000,00	1	247.000.000,00	1	250.000.000,00			
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0			
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0			
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				752.700.653,00		762.516.331,00		765.538.331,00		767.374.761,00		776.581.047,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	752.700.653,00	1	762.516.331,00	1	765.538.331,00	1	767.374.761,00	1	776.581.047,00			
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.500.000,00		58.000.000,00		73.000.000,00		79.000.000,00		88.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			48.500.000,00		58.000.000,00		73.000.000,00		79.000.000,00		88.000.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)														
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)														
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20		20		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)														
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14		14		14		14		14		14		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	22		22		22		22		22		22		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	15.000.000,00	14	18.000.000,00	14	20.000.000,00	14	22.000.000,00	14	25.000.000,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	22	25.000.000,00	22	30.000.000,00	22	35.000.000,00	22	37.000.000,00	22	40.000.000,00		
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.500.000,00		10.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	8.500.000,00	20	10.000.000,00	20	18.000.000,00	20	20.000.000,00	20	23.000.000,00		
1.03.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.917.738.900,00		4.737.391.500,00		4.609.468.100,00		4.458.071.400,00		4.324.268.600,00		
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	45,94	46,09	4.917.738.900,00	46,22	4.737.391.500,00	46,34	4.609.468.100,00	46,47	4.458.071.400,00	46,59	4.324.268.600,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.917.738.900,00		4.737.391.500,00		4.609.468.100,00		4.458.071.400,00		4.324.268.600,00		
Terlaksananya pembangunan irigasi	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	10	5	4.917.738.900,00	5	4.737.391.500,00	5	4.609.468.100,00	5	4.458.071.400,00	5	4.324.268.600,00		
	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,1	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	10,85	1,10		1,10		1,10		1,00		1,00			
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				4.340.000.000,00		4.162.325.200,00		4.048.869.800,00		3.897.532.100,00		3.769.984.900,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	10,85	1,10	4.340.000.000,00	1,10	4.162.325.200,00	1,10	4.048.869.800,00	1,00	3.897.532.100,00	1,00	3.769.984.900,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				50.338.900,00		50.966.300,00		50.138.300,00		50.519.300,00		50.973.700,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,1	0,04	50.338.900,00	0,04	50.966.300,00	0,04	50.138.300,00	0,04	50.519.300,00	0,04	50.973.700,00		
1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				477.400.000,00		474.100.000,00		460.460.000,00		460.020.000,00		453.310.000,00		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	10	5	477.400.000,00	5	474.100.000,00	5	460.460.000,00	5	460.020.000,00	5	453.310.000,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				7.515.627.300,00		7.680.157.900,00		7.897.618.400,00		8.091.379.500,00		8.302.904.700,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan akses Air Minum layak (%)	74,65	75,47	7.515.627.300,00	75,88	7.680.157.900,00	76,30	7.897.618.400,00	76,71	8.091.379.500,00	77,12	8.302.904.700,00	1.03.0.00.0.00.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari (%)	-	100		100		100		100		100			
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				7.515.627.300,00		7.680.157.900,00		7.897.618.400,00		8.091.379.500,00		8.302.904.700,00		
Terlaksananya penyediaan akses air minum layak	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1	25	7.515.627.300,00	26,5	7.680.157.900,00	28	7.897.618.400,00	29,5	8.091.379.500,00	31	8.302.904.700,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				7.115.627.300,00		7.280.157.900,00		7.497.618.400,00		7.691.379.500,00		7.902.904.700,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1	25	7.115.627.300,00	26,5	7.280.157.900,00	28	7.497.618.400,00	29,5	7.691.379.500,00	31	7.902.904.700,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				56.458.900,00		30.611.400,00		43.409.400,00		38.903.900,00		47.368.400,00		
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah Kabupaten Regional yang tersedia (%)	-	100	56.458.900,00	100	30.611.400,00	100	43.409.400,00	100	38.903.900,00	100	47.368.400,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				56.458.900,00		30.611.400,00		43.409.400,00		38.903.900,00		47.368.400,00		
Terlaksananya penyediaan sarana pendukung pengelolaan persampahan kabupaten	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	0	1	56.458.900,00	1	30.611.400,00	1	43.409.400,00	1	38.903.900,00	1	47.368.400,00		
1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				56.458.900,00		30.611.400,00		43.409.400,00		38.903.900,00		47.368.400,00		
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	0	1	56.458.900,00	1	30.611.400,00	1	43.409.400,00	1	38.903.900,00	1	47.368.400,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				6.468.292.000,00		6.246.493.000,00		6.024.693.000,00		5.802.893.000,00		5.581.094.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	-	100	6.468.292.000,00	100	6.246.493.000,00	100	6.024.693.000,00	100	5.802.893.000,00	100	5.581.094.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	71,20	71,40		71,51		71,61		71,71		71,82			
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.468.292.000,00		6.246.493.000,00		6.024.693.000,00		5.802.893.000,00		5.581.094.000,00		
Terlaksananya penyediaan akses sanitasi layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1	249	6.468.292.000,00	240	6.246.493.000,00	232	6.024.693.000,00	223	5.802.893.000,00	215	5.581.094.000,00		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				6.468.292.000,00		6.246.493.000,00		6.024.693.000,00		5.802.893.000,00		5.581.094.000,00		
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1	249	6.468.292.000,00	240	6.246.493.000,00	232	6.024.693.000,00	223	5.802.893.000,00	215	5.581.094.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				37.948.300,00		16.835.600,00		27.289.300,00		23.609.100,00		30.523.100,00		
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	65	65	37.948.300,00	65,5	16.835.600,00	66	27.289.300,00	66,5	23.609.100,00	67	30.523.100,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				37.948.300,00		16.835.600,00		27.289.300,00		23.609.100,00		30.523.100,00		
Terlaksananya realisasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1	0	37.948.300,00	0	16.835.600,00	0	27.289.300,00	0	23.609.100,00	0	30.523.100,00		
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1	10		30		30		50		60			
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				37.948.300,00		16.835.600,00		27.289.300,00		23.609.100,00		30.523.100,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1	10	37.948.300,00	30	16.835.600,00	30	27.289.300,00	50	23.609.100,00	60	30.523.100,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				46.458.900,00		20.611.400,00		33.409.400,00		28.903.900,00		37.368.400,00		
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Lingkungan Perkantoran yang ditata (%)	-	50	46.458.900,00	50	20.611.400,00	50	33.409.400,00	50	28.903.900,00	50	37.368.400,00		1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				46.458.900,00		20.611.400,00		33.409.400,00		28.903.900,00		37.368.400,00		
Terlaksananya Penataan Lingkungan Perkantoran	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	46.458.900,00	1	20.611.400,00	1	33.409.400,00	1	28.903.900,00	1	37.368.400,00		
	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				46.458.900,00		20.611.400,00		33.409.400,00		28.903.900,00		37.368.400,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	46.458.900,00	1	20.611.400,00	1	33.409.400,00	1	28.903.900,00	1	37.368.400,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				18.950.605.000,00		27.680.123.000,00		38.574.129.000,00		43.153.318.000,00		47.950.117.000,00		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Panjang jalan poros desa Strategis yang tertangani (KM)	7	5	18.950.605.000,00	5	27.680.123.000,00	5	38.574.129.000,00	5	43.153.318.000,00	5	47.950.117.000,00		1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	65,60	69,60		18.950.605.000,00	71,60		27.680.123.000,00	73,60		38.574.129.000,00	75,60		43.153.318.000,00	77,60		47.950.117.000,00
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					18.950.605.000,00			27.680.123.000,00			38.574.129.000,00			43.153.318.000,00			47.950.117.000,00
Terlaksananya penanganan Jalan di Kabupaten Pandeglang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	2		18.950.605.000,00	10		27.680.123.000,00	10		38.574.129.000,00	10		43.153.318.000,00	10		47.950.117.000,00
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	11	1			1			1			1			1		
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	732,495	732,495			732,495			732,495			732,495			732,495		
	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	5	1			1,2			1,6			2			2,2		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)		0			1			1			1			1		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1	1			1,5			2,15			2,5			2,7		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	5	1			1			1			1			1		
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	2	2,2			2,5			3,5			4			4,2		
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0,24	0,24			0,88			0,95			0,24			0,66		
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1	0			0			1			1			1		
Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1	1			1			1			1			1			
Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1	0,05			0,08			0,2			0,4			0,42			
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					100.605.000,00			530.123.000,00			524.129.000,00			524.131.000,00			524.129.000,00
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	2		100.605.000,00	10		530.123.000,00	10		524.129.000,00	10		524.131.000,00	10		524.129.000,00
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan					200.000.000,00			200.000.000,00			200.000.000,00			379.187.000,00			400.000.000,00
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	732,495	732,495		200.000.000,00	732,495		200.000.000,00	732,495		200.000.000,00	732,495		379.187.000,00	732,495		400.000.000,00
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan					500.000.000,00			1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			1.200.000.000,00			1.325.988.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	5	1		500.000.000,00	1		1.000.000.000,00	1		1.000.000.000,00	1		1.200.000.000,00	1		1.325.988.000,00
1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					3.000.000.000,00			3.600.000.000,00			4.800.000.000,00			6.000.000.000,00			6.600.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	5	1	3.000.000.000,00	1,2	3.600.000.000,00	1,6	4.800.000.000,00	2	6.000.000.000,00	2,2	6.600.000.000,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)		0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				6.600.000.000,00		7.500.000.000,00		10.500.000.000,00		12.000.000.000,00		12.600.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	2	2,2	6.600.000.000,00	2,5	7.500.000.000,00	3,5	10.500.000.000,00	4	12.000.000.000,00	4,2	12.600.000.000,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				3.000.000.000,00		4.500.000.000,00		6.450.000.000,00		7.500.000.000,00		8.100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1	1	3.000.000.000,00	1,5	4.500.000.000,00	2,15	6.450.000.000,00	2,5	7.500.000.000,00	2,7	8.100.000.000,00		
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				1.000.000.000,00		1.600.000.000,00		4.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.400.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1	0,05	1.000.000.000,00	0,08	1.600.000.000,00	0,2	4.000.000.000,00	0,4	8.000.000.000,00	0,42	8.400.000.000,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				1.200.000.000,00		4.400.000.000,00		4.750.000.000,00		1.200.000.000,00		3.300.000.000,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0,24	0,24	1.200.000.000,00	0,88	4.400.000.000,00	0,95	4.750.000.000,00	0,24	1.200.000.000,00	0,66	3.300.000.000,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		700.000.000,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	11	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	700.000.000,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				0,00		0,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1	0	0,00	0	0,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				37.948.300,00		16.835.600,00		27.289.300,00		23.609.100,00		30.523.100,00		
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang tersertifikasi (%)	-	50	37.948.300,00	50	16.835.600,00	50	27.289.300,00	50	23.609.100,00	50	30.523.100,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				3.000.000,00		3.000.000,00		13.876.700,00		8.609.100,00		9.523.100,00		
Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	13.876.700,00	0	8.609.100,00	0	9.523.100,00		
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				1.000.000,00		1.000.000,00		11.876.700,00		6.609.100,00		7.523.100,00		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	11.876.700,00	0	6.609.100,00	0	7.523.100,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				33.948.300,00		12.835.600,00		12.412.600,00		14.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan jasa konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	0	0	33.948.300,00	0	12.835.600,00	0	12.412.600,00	0	14.000.000,00	0	20.000.000,00		
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	0	0		0		0		0					
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				31.948.300,00		10.835.600,00		10.412.600,00		10.000.000,00		16.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1	1	31.948.300,00	1	10.835.600,00	1	10.412.600,00	1	10.000.000,00	1	16.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				54.969.600,00		200.000.000,00		500.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase RDTR dan RTRW yang disusun (%)	11,11	13,89	54.969.600,00	13,89	200.000.000,00	13,89	500.000.000,00	13,89	100.000.000,00	13,89	200.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				14.969.600,00		160.000.000,00		460.000.000,00		60.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	14.969.600,00	0	160.000.000,00	0	460.000.000,00	0	60.000.000,00	0	160.000.000,00		
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				13.969.600,00		159.000.000,00		459.000.000,00		59.000.000,00		159.000.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	13.969.600,00	1	159.000.000,00	1	459.000.000,00	1	59.000.000,00	1	159.000.000,00		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		

4.2 Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang

Program Kerja Prioritas Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan tanggung jawab DPUPR Kabupaten Pandeglang berdasarkan RPJMD adalah PETARUNG. Adapun Program yang menjadi kewenangan DPUPR Kabupaten Pandeglang yang mendukung Program Kerja Prioritas ini berdasarkan RPJMD adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Penyelenggaraan Jalan.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
2.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
3.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan 1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029

IKU dan IKK yang direncanakan akan dicapai oleh DPUPR Kabupaten Pandeglang adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
2.	Persentase Layanan Infrastruktur	%	-	60	61,25	62,50	63,75	65,00	66,25	
3.	Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	63,62	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,30	70,55	70,80	71,05	71,30	71,55	71,80	
5.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	-	15,8	16,65	17,5	18,35	19,2	20,05	
6.	Persentase Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah Kabupaten yang tersedia	%	-	0	0	100	100	100	100	
7.	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengikuti Assesment	%	80	100	100	100	100	100	100	
8.	Kapasitas Air Baku	(%)	2,006	2,009	2,012	2,015	2,018	2,021	2,024	
9.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	45,94	45,97	46,09	46,22	46,34	46,47	46,59	
10.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	71,20	71,30	71,40	71,51	71,61	71,71	71,82	
11.	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	%	65,6	67,6	69,6	71,6	73,6	75,6	77,6	
12.	Persentase Kesesuaian Ruang terhadap RTRW	%	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKK) DPUPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Persentase RDTR dan RTRW yang disusun		%	11,11	11,11	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	
3.	Persentase Lingkungan Perkantoran yang ditata	positif	%	-	50	50	50	50	50	50	
4.	IKM Perangkat Daerah	positif	Nilai	82,33	82,6	82,9	83,2	83,5	83,8	84,1	
5.	Persentase rumah tangga dengan akses Air Minum layak	positif	%	74,65	75,06	75,47	75,88	76,30	76,71	77,12	
6.	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang tersertifikasi	positif	%	-	50	50	50	50	50	50	
7.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang berkelanjutan	kumulatif	Nilai	-	-	-	1	1	1	1	
8.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		%	65,60	67,60	69,60	71,60	73,60	75,60	77,60	
9.	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak		%	71,20	71,30	71,40	71,51	71,61	71,71	71,82	
10.	Panjang jalan poros desa Strategis yang tertangani		KM	7	5	5	5	5	5	5	
11.	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		Persentase	65	65	65	65,5	66	66,5	67	
12.	Persentase Irigasi dalam kondisi baik		%	45,94	45,97	46,09	46,22	46,34	46,47	46,59	
13.	Persentase Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah Kabupaten Regional yang tersedia		%	-	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 – 2029 yaitu **“Pandeglang Maju melalui Infrastruktur Mantap, Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera”** menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang mengaplikasikannya kedalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tupoksi tersebut tak lepas dari hambatan dan tantangan yang menyebabkan berhasil atau tidaknya suatu program/kegiatan, dan ini memerlukan Komitmen dan kerjasama yang harmonis dari semua pihak, baik itu Lembaga Eksekutif (Pemerintah Daerah), Lembaga Legislatif (DPRD), dunia usaha (pengusaha/swasta) maupun semua elemen masyarakat sehingga Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tema yang diusung dapat terwujud.

Demikian dokumen Renstra Perubahan ini dibuat, dengan harapan program dan kegiatan pembangunan khususnya infrastruktur yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang dapat terlaksana dengan baik sehingga semua target dapat tercapai.

Pandeglang, September 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pandeglang

ASEP RAHMAT, ST
NIP. 19690425 199803 1 010

LAMPIRAN 1 DO RENSTRA

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	DO IK Tujuan/ Produsen Data	Sasaran PD	saki	Perangkat Daerah	DO IK Sasaran / Produsen Data	Program Kepmen 900/2024	OUTCOME Immendagri 2/2025	Indikator	DO / Produsen Data
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase Layanan Infrastruktur (DPUPR)	--- (Jumlah Persentase Capaian Program Infrastruktur / Jumlah Program Infrastruktur) Rilis DPUPR	Meningkatnya kualitas infrastruktur Air Minum	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kapasitas air baku (m3/detik)	DPUPR	<p>PARAPP - JETASUP - JET</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARAPP: Perencanaan rumah tangga perkotaan memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JETASUP: Jumlah rumah tangga perkotaan memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JET: Jumlah rumah tangga perkotaan di perumahan. 	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan akses Air Minum layak	(Jumlah SR terlayani / Jumlah Rumah keseluruhan) x 100
			Meningkatnya kualitas infrastruktur Sanitasi	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak		(Rumah tangga dg akses sanitasi layak / jml rumah tangga) X100 Rilis DPUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	(Jumlah Rumah Tangga terlayani / Jumlah Rumah keseluruhan) x 100
			Meningkatnya kualitas Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Ruang terhadap RTRW		(Luas kesesuaian pemanfaatan ruang yang diterbitkan/luas kawasan budidaya) x 100% Rilis DPUPR Target 10 Ha per tahun	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase RDTR dan RTRW yang disusun	(Jumlah Dok RDTR dan RTRW yang disusun /Jumlah Dokumen) x 100
							Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	(Jumlah Bangunan Gedung Negara dalam Kondisi Baik/Jumlah bangunan Gedung Negara)*100%
							Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Lingkungan Perkantoran yang ditata	(Jumlah Lingkungan Perkantoran yang ditata/Target tahun n)*100%
			Meningkatnya kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)		(panjang jalan kondisi baik + sedang) / panjang jalan keseluruhan x 100% Rilis DPUPR	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	(Panjang Jalan yang ditangani / Jumlah Panjang Jalan) x 100
									Panjang Jalan poros desa Strategis yang tertangani (KM)	Panjang Jalan Desa/ Poros Desa yang tertangani (KM)
			Meningkatnya Kompetensi SDM Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengikuti Assesment		(Badan Usaha yang hadir Assesment/Badan Usaha yang diundang Assesment)x 100%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang tersertifikasi	(Jumlah Peserta yang tersertifikasi(Lulus)/Jumlah Peserta yang mengikuti Assesment) x 100%

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	DO IK Tujuan/ Produsen Data	Sasaran PD	saki	Perangkat Daerah	DO IK Sasaran / Produsen Data	Program Kepmen 900/2024	OUTCOME Inmendagri 2/2025	Indikator	DO / Produsen Data
			Meningkatnya Irigasi dalam Kondisi Baik	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	DPUPR	(jml irigasi yang direhab / total jml irigasi) x100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Irigasi dalam kondisi baik	(Luas Irigasi dalam Kondisi Baik / Total Luas Irigasi) x 100
			Meningkatnya kualitas Infrastruktur Persampahan	Persentase Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah Kabupaten yang tersedia	DPUPR	(Jumlah Unit Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah yang tersedia / Target Unit sarana pendukung tahun n) x 100%	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan persampahan Regional	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Sarana Pendukung Pengelolaan Sampah Kabupaten Regional yang tersedia	(Jml Sarpras persampahan yg tersedia / Jumlah Ideal sarpras dibangun di TPA Regional) x 100%

